

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Amir M. S., 2005, *Tanya Jawab Adat Minangkabau: Asal-Usul Nama Minangkabau*, Karya Dunia Fikir, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, PT Gunung Agung, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam, 2019, *Kecamatan Sungai Pua dalam Angka 2019*, CV Sarana Multi Abadi.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, CV Nuansa Aulia, Medan.
- Firman Hasan, 1988, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Pusat Penelitian Universitas Andalas, Padang.
- Helmy Panuh, 2012, *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. C. T. Simorangkir, dkk, 2004, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laksanto Utomo, 2017, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Depok.
- Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Penerbit Republika, Jakarta.
- M. Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV Mandar Maju, Bandung.

Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer: Telaah Kritis terhadap Hukum Adat sebagai Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*, PT Alumni Bandung, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.

Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah: Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero, 1987, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, CV Haji Masagung, Jakarta.

St. Mahmood BA dan A. Manan Rajo Pangulu, 1987, *Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah*, Pustaka Indonesia, Medan.

Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu,

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

C. Jurnal-jurnal

Agnes Livia Merlani, Yulia Qamariyanti, dan Mahyuni, 2016, “*Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum Hak atas Tanah Adat dalam Pendaftaran Tanah*”, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol. 1, Issue 1, March 2016.

Haryati, 2007, “*Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Menjamin Kepastian Hukum*”, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol.5, No.1, Oktober 2007.

Ilhamdi Taufik dan Muhammad Ikhsan Alia, 2017, “*Jaminan Konstitusionalitas Hak Asal Usul Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat*”, *Lex Journal Kajian Hukum & Keadilan*.

I Wayan Suwanda, 2013, “*Eksistensi Tanah Adat Druwe dalam Perspektif Sistem Hukum Pertanahan Nasional*”, *Jurnal IUS*, Vol I, Nomor 1, April 2013.

Muhammad Bakri, 2008, “*Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)*”, *Kertha Patrika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2008.

Widhiana H. Puri, 2017, “*Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif Di Bidang Agraria Di Indonesia*”, *Bhumi* Vol. 3, No. 1, Mei 2017.

D. Internet

“Pengertian Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, <http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 24 Desember 2020 pukul 10.30 WIB.